

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan fokus pada studi kasus di Desa Jaba, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan kepala desa yang diduga melakukan politisasi dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta rendahnya pemahaman terhadap substansi Permendagri tersebut oleh aparat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Jaba belum berjalan secara optimal. Kepala desa cenderung menggunakan kewenangannya secara subjektif, tanpa mengindahkan prosedur dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum turut memperparah praktik penyimpangan dalam kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas pemahaman hukum bagi aparatur desa.

Kata Kunci : Impelementasi kebijakan, perangkat desa, kepala desa

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials, with a case study in Jaba Village, Namorambe Subdistrict, Deli Serdang Regency. The main issues addressed in this research are the alleged politicization by the village head in the process of appointing and dismissing village officials, and the general lack of understanding of the regulation's provisions among village authorities. This research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of Permendagri No. 67/2017 in Jaba Village has not been carried out effectively. The village head tends to exercise authority subjectively, disregarding established procedures and legal principles. Furthermore, inadequate dissemination and limited legal literacy among local officials have exacerbated irregular practices in managing village apparatus. This study recommends stronger oversight by regional governments and improved legal capacity building for village administrators.

Keywords : policy implementation, village officials, village head